



Management
System
ISO 9001:2015
www.tuv.com
ID 910001580

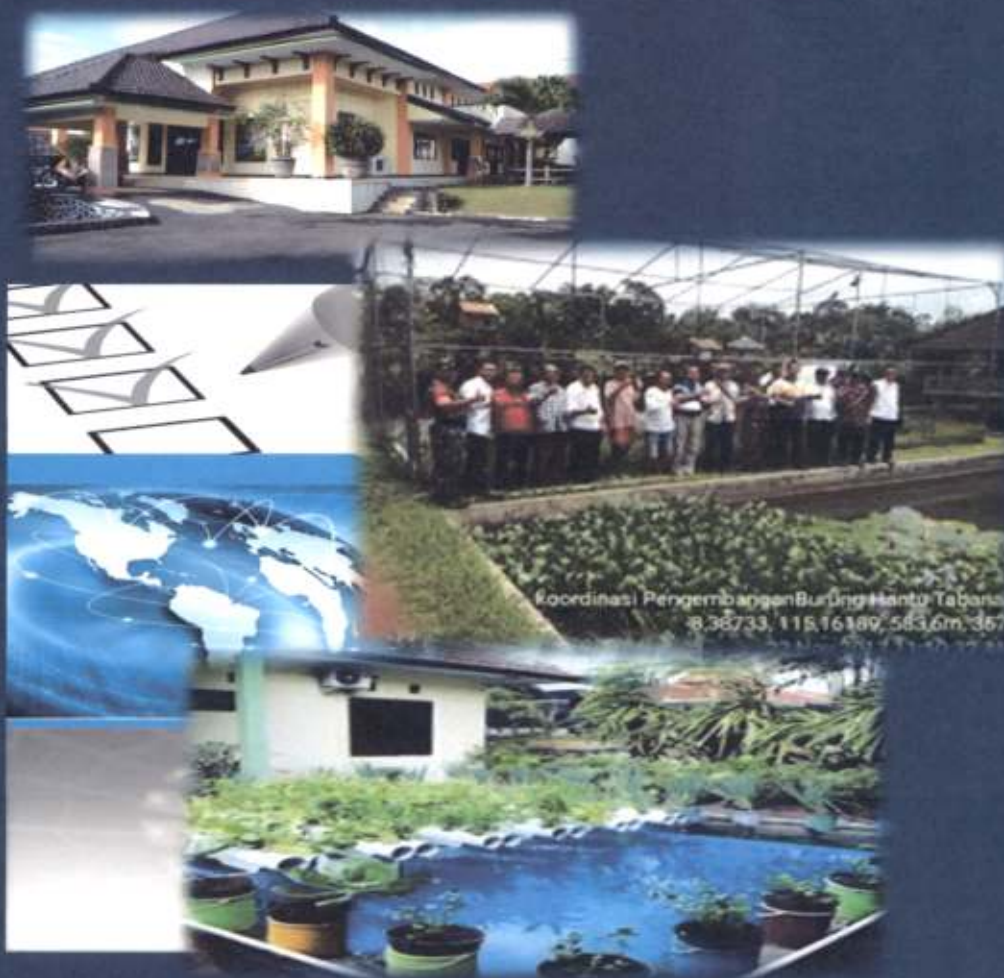
LAPORAN KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 018

TAHUN ANGGARAN 2017

**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN
KETINDAN**

018.10.0500.239654.KD

Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2017



Koordinasi Pengembangan Budidaya Hutan Tabung
8.38733, 115.16189, 583.6m, 357

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2017**

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2017



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013, Menteri/Pimpinan/Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah salah satu entitas akuntansi dari Kementerian Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Malang, 31 Desember 2017

Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian
Ketindan,



Dr. drh. Kresno Suharto, MP
NIP. 19630807 199103 1 002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Pernyataan Telah Direviu

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan	8
I Laporan Realisasi Anggaran	10
II Neraca	11
III Laporan Operasional	12
IV Laporan Perubahan Ekuitas	13
V Catatan atas Laporan Keuangan	14
A Penjelasan Umum	14
B Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	21
B.1 Pendapatan	21
B.2 Belanja	22
B.2.1 Belanja Pegawai	23
B.2.2 Belanja Barang	23
B.2.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24
B.2.4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	24
B.2.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	25
C Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
C.1 Aset Lancar	26
C.1.1 Persediaan	26
C.2 Aset Tetap	26
C.2.1 Peralatan dan Mesin	26
C.2.2 Gedung dan Bangunan	27
C.2.3 Jalan, Irigasi dan Jaringan	27
C.2.4 Aset Tetap Lainnya	28
C.2.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	28
C.3 Aset Lainnya	28
C.3.1 Aset Tak Berwujud	28
C.3.2 Aset Lain-lain	29
C.3.3 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	29

C.4	Kewajiban Jangka Pendek	30
C.4.1	Utang kepada Pihak Ketiga	30
C.5	Ekuitas	30
C.5.1	Ekuitas	30
D	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	31
D.2	Beban Pegawai	31
D.3	Beban Persediaan	32
D.4	Beban Barang dan Jasa	33
D.5	Beban Pemeliharaan	34
D.6	Beban Perjalanan Dinas	34
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	35
D.8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	35
D.9	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	35
D.10	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	36
D.11	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.....	36
D.12	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	37
E	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
E.1	Ekuitas Awal	38
E.2	Surplus/Defisit-LO	38
E.3	Penyesuaian Nilai Aset	38
E.4	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	38
E.5	Transaksi Antar Entitas	38
E.6	Ekuitas Akhir	38
F	Pengungkapan-pengungkapan Lainnya	39
F.1	Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca.....	39
F.2	Temuan dan Tindak Lanjut Atas Temuan BPK	39
F.3	Revisi DIPA dan Kronologisnya	39
F.4	Pengungkapan Lain-lain	41

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1 : Laporan Realisasi Anggaran	10
Tabel 2 : Neraca per 31 Desember 2017 dan per 31 Desember 2016	11
Tabel 3 : Laporan Operasional	12
Tabel 4 : Laporan Perubahan Ekuitas	13
Tabel 5 : Penggolongan Kualitas Piutang	18
Tabel 6 : Masa Manfaat Aset	19
Tabel 7 : Rincian Anggaran Awal dan Anggaran Setelah Revisi	21
Tabel 8 : Rincian estimasi dan Realisasi Pendapatan	21
Tabel 9 : Perbandingan realisasi Pendapatan	22
Tabel 10 : Rincian Pagu dan realisasi Belanja	22
Tabel 11 : Perbandingan Realisasi Belanja	23
Tabel 12 : Perbandingan Belanja Pegawai	23
Tabel 13 : Perbandingan Belanja Barang	24
Tabel 14 : Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24
Tabel 15 : Perbandingan Belanja Modal gedung dan Bangunan	25
Tabel 16 : Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	25
Tabel 17 : Perbandingan Persediaan	26
Tabel 18 : Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin	26
Tabel 19 : Mutasi Nilai Gedung dan Bangunan	27
Tabel 20 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	28
Tabel 21 : Rincian Saldo Aset Tak Berwujud	28
Tabel 22 : Mutasi Nilai Aset Lain-lain	29
Tabel 23 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	29
Tabel 24 : Perbandingan Utang Kepada Pihak Ketiga	30
Tabel 25 : Perbandingan PNBPN Lainnya	31
Tabel 26 : Perbandingan Beban Pegawai	32
Tabel 27 : Perbandingan Beban Persediaan	33
Tabel 28 : Perbandingan Beban Barang dan Jasa	33
Tabel 29 : Perbandingan Beban Pemeliharaan	34
Tabel 30 : Perbandingan Beban Perjalanan Dinas	34
Tabel 31 : Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi	35
Tabel 32 : Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	36
Tabel 33 : Perbandingan Beban Pelepasan Aset Non Lancar	36
Tabel 34 : Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	36
Tabel 35 : Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	37
Tabel 36 : Daftar Rekening Pemerintah	41

DAFTARLAMPIRAN

UAKPA

- Lampiran I : Telaah Laporan Keuangan
- Lampiran II : Laporan Keuangan per 31 Desember 2017
- Lampiran III : Berita Acara Rekonsiliasi SAI dengan KPPN setempat Semester II Tahun 2017
- Lampiran IV : Memo Jurnal Penyesuaian

SIMAK BMN

- Lampiran V : Laporan Kuasa Pengguna Barang per 31 Desember 2017
- Lampiran VI : Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data Barang Milik Negara Semester II Tahun 2017
- Lampiran VII : Berita Acara Pemeriksaan Fisik (Stock Opname) Persediaan per 31 Desember 2017 dan Lampiran Hasil Pemeriksaan Fisik
- Lampiran VIII : Rekapitulasi Belanja Modal Semester II Tahun 2017
- Lampiran IX : BAST BMN
- Lampiran X : Surat Keterangan/Keputusan Mengenai BMN

BENDAHARA PENGELUARAN

- Lampiran XI : Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi antara petugas UAKPA dan Bendahara Pengeluaran
- Lampiran XII : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Periode Semester II Tahun 2017
- Lampiran XIII : SSPB Terkait Penyetoran Pengembalian Bendahara Pengeluaran

BENDAHARA PENERIMAAN

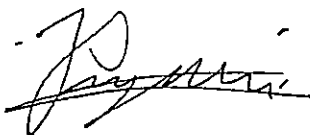
- Lampiran XIV : Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Rekonsiliasi antara petugas UAKPA dan Bendahara Penerimaan
- Lampiran XV : Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Periode Semester II Tahun 2017
- Lampiran XVI : SSPB terkait penyetoran Kas Di Bendahara Penerimaan (PNBP)

LAIN-LAIN

- Lampiran XVII : DIPA, Revisi DIPA dan POK Semester II Tahun 2017
- Lampiran XVIII : SP2D Sampai Dengan 31 Desember 2017
- Lampiran XIX : Persetujuan Kembali atas Pembukaan Rekening
- Lampiran XX : SK Penetapan Pejabat

CATATAN HASIL REVIU (GHR)

Kementerian Pertanian Inspektorat Jenderal		Disusun oleh/Tanggal	Imam Prayudhi
		Direviu oleh/Tanggal	Suyitno
		Disetujui oleh/Tanggal	Cholik Setyadi
UAPA	Kementerian Pertanian (018)		
UAPPA-E1	BPPSDMP (10)		
UAPPA-W	Jawa Timur (0500)		
UAKPA	BBPP Ketindan (239654)		
Uraian/Catatan Hasil Reviu		Indeks KKR	
Penyelenggaraan Akuntansi			
Penyajian LK			
A. LRA		KKR LRA	
1. Rekonsiliasi LRA Belanja, Pengembalian Belanja, Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan periode 31 Desember 2017, telah dilakukan antara UAKPA dengan KPPN yang menyatakan tidak terdapat perbedaan antara Data SAU dengan SAI.			
2. Jumlah PNPB yang disajikan dalam LRA senilai Rp302.984.800,00 telah sesuai dengan laporan PNPB			
3. Terdapat PNPB senilai Rp302.984.800,00 yang berasal dari Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan senilai Rp28.611.000,00; Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan senilai Rp10.668.800,00; Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga senilai Rp262.150.000,00; TP TGR senilai Rp1.000.000,00; Penerimaan kembali belanja pegawai pusat tahun anggaran yang lalu senilai Rp555.000,00 yang telah disetorkan ke Kas Negara disertai bukti SSBP.			
B. LO		KKR LO	
1. Terdapat perbedaan senilai Rp3.107.361,00 pada Beban Barang dalam LO dengan Belanja Barang/Jasa dalam Neraca Percobaan Kas. Akibat dari Beban Langganan Listrik terdapat selisih Rp2.731.298,00 dengan Belanja Langganan Listrik dan dari Beban Langganan Telepon terdapat selisih Rp376.063,00 dengan Belanja Langganan Telepon. Hal ini dikarenakan terdapat Belanja Langganan Listrik dan Belanja Langganan Telpn tahun sebelumnya (2016) yang dibebankan pada tahun 2017 dan pembebanan Belanja Langganan Listrik dan Belanja Langganan Telpn bulan Desember 2017 pada Belanja Langganan Listrik dan Belanja Langganan Telpn tahun 2018.			
C. LPE		KKR LPE	
D. Neraca		KKR Neraca	
1. Terdapat Aset Tanah seluas 47.334 M2 senilai 13.890.000.000,00 belum memiliki sertifikat atas nama Kementerian Pertanian (masih atas nama Pemprov Jawa Timur) dan saat reviu masih dalam proses balik nama sertifikat dari Pemprov Jawa Timur ke Kementerian Pertanian.			
2. Terdapat Aset Tetap yang Tidak Digunakan senilai Rp1.015.200.053,00 yang masih belum menerima BA Penghapusan.			
3. Satker telah melaksanakan Inventarisasi Internal terhadap Aset Tetap dengan perincian Aset Tetap berupa Peralatan dan mesin senilai Rp16.155.172.671,00; Gedung dan Bangunan senilai Rp19.415.958.280,00; Jalan dan Jembatan senilai Rp765.639.337,00; Irigasi senilai Rp992.767.000,00; Jaringan senilai Rp312.121.000,00; dan Aset Tetap lainnya senilai Rp173.451.241,00. Hasil dari inventarisasi tersebut sudah diajukan kepada KPKNL dan akan dilakukan IP oleh KPKNL pada bulan April/Mei 2018.			
E. CaLK & CaLBMN		KKR CaLK	
1. Aset yang sudah Pengungkapan Penetapan Status Pengguna (PSP) senilai Rp22.419.890.182,00, yang belum pengungkapan PSP senilai Rp13.395.400.018,00.			
2. Terdapat kesalahan penulisan dalam CaLK dan CaLBMN			
Rekomendasi			
1. Untuk selanjutnya Pembebanan Belanja Langganan Listrik dan Belanja Langganan Telepon diselesaikan pada tahun berjalan.			
2. Menelusuri dan mengawal proses pembuatan BA Penghapusan terhadap Aset Tetap yang tidak digunakan di Sekretariat Jenderal.			
3. Berkoordinasi dengan Sekretariat Jenderal terkait dengan proses balik nama sertifikat tanah yang ditempati oleh BBPP Ketindan.			
4. Membuat BA Penetapan Status Barang terhadap Aset Tetap senilai Rp13.395.400.018,00 yang belum dilakukan Penetapan Status Pengguna.			

3. Memperbaiki CaLK dan CaLBMN		
PEREVIU	PETUGAS SAIBA	PETUGAS SIMAK BMN
	 Lelly C. Maulid NO HP. 085313970313	 Ekowani Andansari NO HP. 081216288159

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Malang, 31 Desember 2017



Dr. drh. Kresno Suharto, MP
NIP. 19630807 199103 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan keuangan tersebut disertai dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) untuk periode semester I dan Tahunan.

Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan Tahun 2017 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2017 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp302.984.800,00 atau mencapai 102,43% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp295.796.600,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2017 adalah sebesar Rp22.632.804.838,00 atau mencapai 97,19% dari alokasi anggaran sebesar Rp23.286.542.000,00

II Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2017.

Nilai Aset per 31 Desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp22.014.486.000,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp89.195.800,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp21.910.536.862,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp14.753.338,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp17.231.855,00 dan Rp21.997.254.145,00

III Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa,

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp301.429.800,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp24.030.722.782,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-23.729.292.982,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-82.811.629,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-23.812.104.611,00.

IV Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2017 adalah sebesar Rp23.476.278.031,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-23.812.104.611,00, kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp22.333.080.725,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2017 adalah senilai Rp21.997.254.145,00

V Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2017 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016**

Uraian	Catatan	31 Desember 2017			31 Desember 2016
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	295.796.600,00	302.984.800,00	102,43	234.901.300,00
Jumlah Pendapatan		295.796.600,00	302.984.800,00	102,43	234.901.300,00
BELANJA	B.2				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1	6.259.453.000,00	6.041.646.057,00	96,52	5.992.883.500,00
Belanja Barang	B.2.2	15.849.893.000,00	15.438.445.781,00	97,40	16.789.851.586,00
Jumlah Belanja Operasi		22.109.346.000,00	21.480.091.838,00	97,15	22.782.735.086,00
Belanja Modal					
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	B.2.3	548.756.000,00	524.423.000,00	95,57	2.714.766.375,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	B.2.4	608.190.000,00	608.040.000,00	99,98	1.630.408.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	B.2.5	20.250.000,00	20.250.000,00	100,00	115.403.0000,00
Jumlah Belanja Modal		1.177.196.000,00	1.152.713.000,00	97,92	4.460.577.375,00
Jumlah Belanja		23.286.542.000,00	22.632.804.838,00	97,19	27.243.312.461,00

Malang, 31 Desember 2017

Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian
Ketindan



Dr. drh. Kresno Suharto, MP
NIP. 19630807 199103 1 002

II. NERACA

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1	89.195.800,00	13.436.500,00
Jumlah Aset Lancar		89.195.800,00	13.436.500,00
Aset Tetap			
Peralatan dan Mesin	C.2.1	16.155.172.671,00	16.634.098.371,00
Gedung dan Bangunan	C.2.2	19.415.958.280,00	18.807.918.280,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.3	2.070.527.337,00	2.050.277.337,00
Aset Tetap Lainnya	C.2.4	173.451.242,00	181.576.095,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	C.2.5	-11.729.602.380,00	-10.797.742.455,00
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	C.2.5	-3.175.125.631,00	-2.586.766.337,00
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.5	-999.844.657,00	-932.989.515,00
Jumlah Aset Tetap		21.910.536.862,00	23.356.371.776,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.3.1	0,00	64.075.000,00
Aset Lain-lain	C.3.2	1.079.275.053,00	181.922.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	C.3.3	-1.064.521.715,00	-124.650.631,00
Jumlah Aset Lainnya		14.753.338,00	121.346.369,00
Jumlah Aset		22.014.486.000,00	23.491.154.645,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1	17.231.855,00	14.876.620,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		17.231.855,00	14.876.620,00
Jumlah Kewajiban		17.231.855,00	14.876.620,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.1	21.997.254.145,00	23.476.278.025,00
Jumlah Ekuitas		21.997.254.145,00	23.476.278.025,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		22.014.486.000,00	23.476.278.025,00

Malang, 31 Desember 2017

Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian
Ketindan,

Dr. drh. Kresno Suharto, MP
 NIP. 19630807 199103 1 002

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	301.429.800,00	228.476.300,00
JUMLAH PENDAPATAN		301.429.800,00	228.476.300,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	6.041.646.057,00	5.992.883.500,00
Beban Persediaan	D.3	243.598.140,00	111.573.500,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	6.991.667.279,00	7.913.988.876,00
Beban Pemeliharaan	D.5	886.851.129,00	720.353.900,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	7.279.904.908,00	7.664.624.189,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7	0,00	370.290.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8	2.587.055.269,00	2.462.876.848,00
JUMLAH BEBAN		24.030.722.782,00	25.236.590.813,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-23.729.292.982,00	-25.008.114.513,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	0,00	3.750.000,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.10	121.346.369,00	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	38.834.390,00	14.459.700,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.12	299.650,00	1.803.800,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-82.811.629,00	16.405.900,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-23.812.104.611,00	-24.991.708.613,00

Malang, 31 Desember 2017

Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian
Ketindan



Dr. drh. Kresno Suharto, MP
NIP. 19630807 199103 1 002

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 dan 31 DESEMBER 2016

Uraian	Catatan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
EKUITAS AWAL	E.1	23.476.278.031,00	20.719.889.056,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	-23.812.104.611,00	-24.991.708.613,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANATARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3	0,00	-2.478.185,00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.4	0,00	-2.478.191,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	22.333.080.725,00	27.750.575.773,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		-1.479.023.886,00	2.756.388.975,00
EKUITAS AKHIR		21.997.254.145,00	23.476.278.031,00

Malang, 31 Desember 2017



Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian
Ketindan,

Dr. drh. Kresno Suharto, MP
NIP. 19630807 199103 1 002

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pertanian. Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan memiliki visi menjadi lembaga pelatihan berkualitas untuk mewujudkan SDM pertanian yang professional dan berdaya saing.

Dalam rangka mewujudkan visi, BBPP Ketindan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan program pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing serta mengembangkan jejaring kerjasama dan kemitraan usaha komoditas pertanian melalui pelayanan pelatihan pertanian berkualitas dan konsultasi usaha tani yang prima;
2. Mengembangkan sistem pamantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan sebagai bahan rekomendasi pimpinan dan melakukan pengendalian internal yang akurat, kredibel dan akuntabel;
3. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan fungsional bagi aparatur pertanian berbasis kompetensi dan berdaya saing sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI);
4. Mengembangkan teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI) serta berdaya saing;
5. Mengembangkan kompetensi dan profesionalisme ketenagaan pertanian untuk mendukung pengembangan kawasan pertanian bioindustri menuju peningkatan dan kesejahteraan petani;
6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi usaha tani;
7. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen yang transparan dan akuntabel;
8. Melakukan peningkatan intensitas kerjasama dan promosi terutama bagi instansi prospektif dan sudah pernah bekerja sama dengan pihak Ketindan.

Sejalan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan BBPP Ketindan adalah:

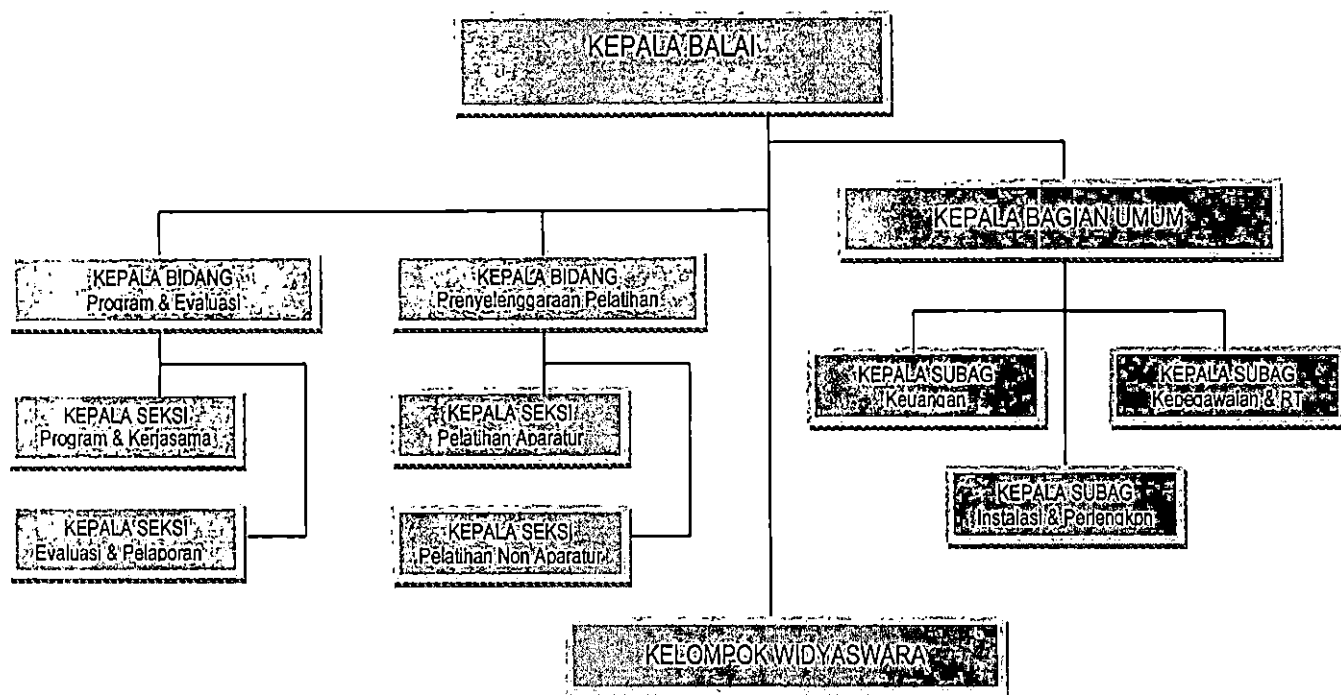
1. Meningkatnya kualitas program pelatihan pertanian berbasis kompetensi dan daya saing dengan penyediaan sistem informasi terintegrasi serta peningkatan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan pelatihan pertanian berkualitas dan konsultasi usaha tani yang prima
2. Meningkatnya kualitas dan efektivitas sistem pamantauan, evaluasi, pelaporan dan pengendalian internal secara akurat, kredibel dan akuntabel
3. Meningkatnya kualitas teknik pelatihan teknis dan fungsional bagi aparatur pertanian berbasis kompetensi kerja sesuai Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI)
4. Meningkatnya kualitas teknik pelatihan teknis dan kewirausahaan bagi non aparatur pertanian sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja (SKK) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKNI)
5. Meningkatnya kompetensi ketenagaan yang berdaya saing dan bermartabat;
6. Mengoptimalkan pendayagunaan sarana dan prasarana pelatihan serta produktivitas instalasi agribisnis;
7. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi sistem administrasi dan manajemen.

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan telah menetapkan 4 (empat) program untuk periode Tahun Anggaran 2017 yang mengacu pada program Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penataan dan Pemantapan Kelembagaan Pelatihan;
2. Peningkatan Profesionalisme Ketenagaan Pelatihan Pertanian;
3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pertanian;
4. Peningkatan Kualitas Program dan Kerjasama Pelatihan Pertanian.

Struktur Organisasi

Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan



A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2017 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2017 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Masa Manfaat Aset

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan .

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil.Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

(8) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No.71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

B PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran Awal dan Anggaran Setelah Revisi

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	41.140.000,00	41.140.000,00
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	9.156.600,00	9.156.600,00
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai dengan Tugas Masing-masing Kementerian Negara/Lembaga	245.500.000,00	245.500.000,00
Jumlah Pendapatan	295.796.600,00	295.796.600,00
Belanja		
Belanja Pegawai	6.182.097.000,00	6.259.453.000,00
Belanja Barang	7.246.307.000,00	15.849.893.000,00
Belanja Modal	114.238.000,00	1.177.196.000,00
Jumlah Belanja	13.542.642.000,00	23.286.542.000,00

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 adalah sebesar 302.984.800,00 atau mencapai 102,43% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp295.796.600,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2017		
	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	41.140.000,00	28.611.000,00	69,54
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	9.156.600,00	10.668.800,00	116,51
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai dengan Tugas Masing-masing Kementerian Negara/Lembaga	245.500.000,00	262.150.000,00	106,78
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	0,00	1.000.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	555.000,00	0,00
	295.796.600,00	302.984.800,00	102,43

Realisasi Pendapatan TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 28,98% dibandingkan TA 2016. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	%
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	28.611.000,00	31.710.000,00	-9,77
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	3.750.000,00	-100
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	10.668.800,00	9.091.300,00	17,35
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai dengan Tugas Masing-masing Kementerian Negara/Lembaga	262.150.000,00	63.775.000,00	311,05
Pendapatan Jasa Lainnya	0,00	123.900.000,00	-100,00
Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara	1.000.000,00	1.750.000,00	-42,86
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	555.000,00	925.000,00	-40,00
Jumlah	302.984.800,00	234.901.300,00	28,98

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2017 adalah sebesar Rp22.632.804.838,00 atau 97,19% dari anggaran belanja sebesar Rp23.286.542.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2017

Uraian	2017		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	6.259.453.000,00	6.044.006.641,00	96,56
Belanja Barang	15.849.893.000,00	15.438.445.781,00	97,40
Belanja Modal	1.177.196.000,00	1.152.713.000,00	97,92
Total Belanja Kotor	23.286.542.000,00	22.635.165.422,00	97,20
Pengembalian Belanja		2.306.584,00	0,00
Total Belanja	23.286.542.000,00	22.632.804.838,00	97,19

Dibandingkan dengan Tahun 2016, Realisasi Belanja TA 2017 mengalami penurunan sebesar 16,92% . Hal ini disebabkan antara lain:

1. Penurunan pagu yang berdampak pada penurunan total belanja.
2. Kenaikan belanja pegawai yang disebabkan oleh kenaikan gaji sebagian pegawai.
3. Penurunan belanja barang yang disebabkan oleh penurunan jumlah diklat yang berasal dari DIPA.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	%
Belanja Pegawai	6,041,646,057.00	5.992.883.500,00	0.81
Belanja Barang	15,438,445,781.00	16.789.851.586,00	(8.05)
Belanja Modal	1,152,713,000.00	4.460.577.375,00	(74.16)
Total Belanja	22,632,804,838.00	27,243,312,461.00	(16.92)

B.2.1 BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6.041.646.057,00 dan Rp5.992.883.500,00. Realisasi belanja TA 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,81% dari TA 2016. Kenaikan belanja gaji ini disebabkan oleh kenaikan tarif uang makan dan kenaikan gaji sebagian pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.044.006.641,00	5.994.178.648,00	0.83
Jumlah Belanja Kotor	6.044.006.641,00	5.994.178.648,00	0.83
Pengembalian Belanja Pegawai	2.306.584,00	-1.295.148,00	78.09
Jumlah Belanja	6.041.646.057.00	5.992.883.500.00	0.81

B.2.2 BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp15.438.445.781,00 dan Rp16.789.851.586,00. Realisasi belanja barang TA 2017 mengalami penurunan sebesar 8,05% dari TA 2016. Penyebabnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Kenaikan belanja operasional disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan untuk kegiatan operasional balai, diantaranya adalah peningkatan honor operasional satuan kerja dan belanja barang operasional lainnya seperti operasional lahan praktek, operasional instalasi laboratorium dan minyak atsiri serta operasional instalasi perkantoran.
2. Penurunan belanja barang non operasional, belanja jasa dan belanja perjalanan dalam negeri disebabkan oleh penurunan jumlah diklat pada tahun 2017.
3. Kenaikan belanja persediaan disebabkan oleh bertambahnya barang persediaan konsumsi untuk kegiatan promosi balai seperti leaflet dan seminar kit.
4. Kenaikan belanja pemeliharaan disebabkan oleh bertambahnya peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan balai sehingga memerlukan peningkatan belanja pemeliharaan.
5. Tidak adanya belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda untuk tahun ini.

Perbandingan Belanja Barang
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1,647,639,520.00	1,378,832,870.00	19.50
Belanja Barang Non Operasional	4,117,712,396.00	5,240,036,997.00	(21.42)
Belanja Barang Persediaan	282,377,700.00	172,815,500.00	63.40
Belanja Jasa	1,223,960,128.00	1,300,699,530.00	(5.90)
Belanja Pemeliharaan	886,851,129.00	662,552,500.00	33.85
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	7,279,904,908.00	7,664,624,189.00	(5.02)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda	-	370,290,000.00	(100.00)
Jumlah Belanja Kotor	15,438,445,781.00	16,789,851,586.00	(8.05)
Pengembalian Belanja Barang	-	-	0.00
Jumlah Belanja	15,438,445,781.00	16,789,851,586.00	(8.05)

B.2.3 BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp524.423.000,00 dan Rp2.714.766.375,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2017 mengalami penurunan sebesar 80,68% dibandingkan TA 2016 yang disebabkan oleh menurunnya jumlah pengadaan peralatan dan mesin.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2016	Realisasi 31 Desember 2015	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	524,423,000.00	2,714,766,375.00	(80.68)
Jumlah Belanja Kotor	524,423,000.00	2,714,766,375.00	(80.68)
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	524,423,000.00	2,714,766,375.00	(80.68)

B.2.4 BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp608.040.000,00 dan Rp1.630.408.000,00 yang mengalami penurunan sebesar 62,71%. Hal ini disebabkan pembangunan gedung dan bangunan untuk tahun ini yaitu rumah pupuk, bangunan perbenihan, ruang belajar outdoor dan screen house, nilainya jauh lebih kecil dibandingkan tahun lalu yaitu berupa penambahan pembangunan gedung pengolahan hasil, tempat alsintan dan toilet.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	608.040.000,00	1.630.408.000,00	(62,71)
Jumlah Belanja Kotor	608.040.000,00	1.630.408.000,00	(62,71)
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	608.040.000,00	1.630.408.000,00	(62,71)

B.2.5 BELANJA MODAL JALAN, IIRIGASI DAN JARINGAN

Realisasi Belanja Modal Jalan , Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp20.250.000,00 dan Rp115.403.000,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2017 mengalami penurunan sebesar -82,45% dibandingkan TA 2016. Hal ini disebabkan oleh perbaikan jalan menuju lahan yang diadakan tahun ini nilainya tidak sebanding dengan perbaikan saluran air dan irigasi yang diadakan tahun lalu.

Perbandingan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2017	Realisasi 31 Desember 2016	Naik (Turun) %
Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	20.250.000,00	0,00	100,00
Belanja Penambahan nilai Jaringan	0,00	115.403.000,00	-100,00
Jumlah Belanja Kotor	20.250.000,00	115.403.000,00	-82,45

C PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET LANCAR

C.1.1 PERSEDIAAN

Saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp89.195.800,00 dan Rp13.436.500,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian Persediaan	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Barang Konsumsi	89.195.800,00	13.436.500,00
Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	0,00
Jumlah	89.195.800,00	13.436.500,00

C.2 ASET TETAP

C.2.1 PERALATAN DAN MESIN

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp16.155.172.671 dan Rp16.634.098.371,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2017

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	16.634.098.371,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	104.035.000,00
Transfer Masuk	3.726.500,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	420.388.000,00
Mutasi Kurang	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(1.007.075.200,00)
Saldo per 31 Desember 2017	16.155.172.671,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	(11.729.602.380,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	4.425.570.291,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Mutasi penambahan peralatan dan mesin berupa pembelian sice, dispenser dan PC dengan rincian terlampir.
2. Transfer masuk berupa notebook berasal dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dengan BAST dan rincian barang terlampir.

3. Mutasi penambahan penyelesaian pembangunan dengan KDP berupa peralatan dan mesin, peralatan dan fasilitas perkantoran serta peralatan pengolah data dan informasi dengan rincian terlampir.
4. Mutasi pengurangan mesin berupa penghentian aset dari penggunaannya dikarenakan barang tersebut sudah rusak berat dengan rincian terlampir.

C.2.2 GEDUNG DAN BANGUNAN

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp19.415.958.280,00 dan Rp18.807.918.280,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2017

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	18,807,918,280.00
Mutasi Tambah	
Pembelian	60,000,000.00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	411,900,000.00
Pengembangan Nilai Aset	0.00
Pengembangan Melalui KDP	136,140,000.00
Mutasi Kurang	
Penghentian Aset dari Penggunaannya	-
Saldo per 31 Desember 2017	19,415,958,280.00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	(3,175,125,631.00)
Nilai Buku per 31 Desember 2017	16,240,832,649.00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan Gedung dan Bangunan adalah berupa:

1. Mutasi penambahan pembelian gedung dan bangunan berupa pembangunan screen house III.
2. Mutasi penambahan penyelesaian pembangunan KDP berupa pembangunan rumah pupuk, bangunan perbenihan dan ruang belajar outdoor.
3. Mutasi penambahan pengembangan melalui KDP berupa rehap screen house depan dan belakang.

C.2.3 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.070.527.337,00 dan Rp2.050.277.337,00. Mutasi penambahan nilai aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp20.250.000,00 berasal dari pembangunan jalan khusus komplek.

C.2.4 ASET TETAP LAINNYA

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp173.451.242,00 dan Rp181.576.095,00. Aset tetap lainnya berupa monografi, maket dan atlas. Mutasi pengurangan nilai aset sebesar Rp8.124.853,00 berasal dari monografi yang telah dihentikan penggunaannya dikarenakan rusak berat. Aset tersebut sedang dalam proses pengajuan penghapusan.

C.2.5 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-15.904.572.668,00 dan Rp-14.317.498.307,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	16,155,172,671.00	11,729,602,380.00	4,425,570,291.00
2.	Gedung dan Bangunan	19,415,958,280.00	3,175,125,631.00	16,240,832,649.00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2,070,527,337.00	999,844,657.00	1,070,682,680.00
4.	Aset Tetap Lainnya	173,451,242.00	-	173,451,242.00
Akumulasi Penyusutan		37,815,109,530.00	15,904,572,668.00	21,910,536,862.00

C.3 ASET LAINNYA

C.3.1 ASET TAK BERWUJUD

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp64.075.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Aset tak berwujud tersebut berupa software yang pada tahun ini nilai bukunya Rp0,00

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Saldo nilai perolehan per 31 Desember 2016	64.075.000,00
Mutasi Kurang	-64.075.000,00
Saldo Per 31 Desember 2017	0,00
Akumulasi amortisasi software	0,00
Nilai Buku Per 31 Desember 2017	0,00

C.3.2 ASET LAIN-LAIN

Nilai Aset Lain-lain yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp1.079.275.053,00 dan Rp181.922.000,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan serta dalam proses penghapusan dari BMN. Mutasi nilai Aset Lain-lain tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Aset Lain-lain Per 31 Desember 2017

Saldo/Nilai Perolehan per 31 Desember 2016	181.922.000,00
Mutasi Kurang	
Penghapusan aset 2016	-181.922.000,00
Penghapusan (BMN yang dihentikan) peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya	-1.015.200.053,00
Penghapusan software	-64.075.000,00
Saldo per 31 Desember 2017	1.079.275.053,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2017	-1.064.521.715,00
Nilai Buku per 31 Desember 2017	14.753.338,00

Mutasi pengurangan akibat penghapusan BMN tersebut disebabkan peralatan dan mesin dalam kondisi rusak berat..

C.3.3 AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp-1.064.521.715,00 dan Rp-124.650.631,00

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Per 31 Desember 2017

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan / Amortisasi	Nilai Buku
1.	Aset Tak berwujud	0,00	0,00	0,00
2.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.079.275.053,00	-1.064.521.715,00	14.753.338,00
Akumulasi Penyusutan		1.079.275.053,00	-1.064.521.715,00	14.753.338,00

C.4 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1 UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp17.231.855,00 dan Rp14.876.620,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang tersebut merupakan beban listrik dan telepon bulan Desember 2017 yang dibayarkan pada bulan Januari 2018. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	17.607.918,00	14.876.620,00
Jumlah	17.607.918,00	14.876.620,00

C.5 EKUITAS

C.5.1 EKUITAS

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp21.997.254.145,00 dan Rp23.476.278.031,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp302.984.800,00 dan Rp234.901.300,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

1. Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan dan perkebunan berupa pendapatan hasil pertanian.
2. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berasal dari perolehan atas sewa rumah dinas dan sewa bangunan koperasi.
3. Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Masing-masing Kementerian Negara/Lembaga berasal dari sewa sarana prasana, dimana pada tahun sebelumnya untuk pendapatan tersebut dialokasikan pada akun pendapatan jasa lainnya.

Perbandingan PNBPL Lainnya
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik/ Turun
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	28.611.000,00	31.710.000,00	-9,77
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.668.800,00	9.091.300,00	17,35
Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Masing-masing Kementerian Negara/Lembaga	262.150.000,00	63.775.000,00	311,05
Pendapatan Jasa Lainnya		123.900.000,00	-100,00
Jumlah	301.429.800,00	228.476.300,00	31,93

D.2 BEBAN PEGAWAI

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6.041.646.057,00 dan Rp5.992.883.500,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban pegawai sebagaimana tersaji pada laporan realisasi anggaran belanja.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik/Turun
Beban Gaji Pokok PNS	4.261.926.400,00	4.277.316.220,00	(0,36)
Beban Pembulatan Gaji PNS	57.409,00	58.545,00	(1,94)
Beban Tunj. Anak PNS	96.207.202,00	89.107.948,00	7,97
Beban Tunj. Beras PNS	241.158.600,00	240.217.140,00	0,39
Beban Tunj. Fungsional PNS	260.955.000,00	233.475.000,00	11,77
Beban Tunj. PPh PNS	17.230.346,00	55.687.131,00	(69,06)
Beban Tunj. Struktural PNS	115.845.000,00	112.605.000,00	2,88
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	336.951.100,00	334.909.516,00	0,61
Beban Tunjangan Umum PNS	121.700.000,00	135.585.000,00	(10,24)
Beban Uang Makan PNS	589.615.000,00	513.922.000,00	14,73
Jumlah	6.041.646.057,00	5.992.883.500,00	0,81

Penjelasan beban pegawai adalah sebagai berikut:

1. Beban gaji pokok PNS mengalami penurunan disebabkan oleh adanya PNS yang pensiun.
2. Beban tunjangan anak dan tunjangan beras PNS meningkat dikarenakan penambahan anak pegawai.
3. Beban tunjangan fungsional PNS mengalami kenaikan karena adanya PNS bagian umum yang beralih menjadi PNS fungsional sehingga berdampak juga pada penurunan tunjangan umum PNS.
4. Beban tunjangan PPh PNS menurun karena pada tahun 2017 untuk PNS golongan III tidak lagi dikenakan PPh.
5. Beban uang makan meningkat disebabkan oleh kenaikan tarif uang makan yang berlaku mulai tahun ini.

D.3 BEBAN PERSEDIAAN

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp243.598.140,00 dan Rp111.573.500,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban persediaan konsumsi di atas terdiri atas pemakaian barang konsumsi selama satu periode senilai Rp243.598.140,00. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut.

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik/ Turun
Beban Persediaan konsumsi	243.598.140,00	111.573.500,00	0.01
Jumlah	243.598.140,00	111.573.500,00	0.01

D.4 BEBAN BARANG DAN JASA

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp6.992.043.342,00 dan Rp7.913.988.876,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik/ Turun
Beban Keperluan Perkantoran	1,011,137,347.00	1,021,620,240.00	-1.03
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,866,260.00	4,799,930.00	-40.29
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	104,520,000.00	83,280,000.00	25.50
Beban Barang Operasional Lainnya	529,115,913.00	269,132,700.00	96.60
Beban Bahan	3,610,354,196.00	4,095,606,920.00	-11.85
Beban Honor Output Kegiatan	325,750,000.00	390,710,000.00	-16.63
Beban Barang Non Operasional Lainnya	181,608,200.00	753,720,077.00	-75.91
Beban Langganan Listrik	183,560,246.00	227,416,966.00	-19.28
Beban Langganan Telepon	21,305,117.00	25,890,043.00	-17.71
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0.00	107,703,000.00	-100.00
Beban Sewa	303,400,000.00	63,550,000.00	377.42
Beban Jasa Profesi	700,450,000.00	796,225,000.00	-12.03
Beban Jasa Lainnya	17,600,000.00	73,800,000.00	-76.15
Beban Aset Ekstrakomptabel Konstruksi Dalam Pengerjaan	0.00	534,000.00	-100.00
Jumlah	6,992,043,342.00	7,913,988,876.00	-11.65

Beban barang dan jasa secara keseluruhan mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya jumlah diklat yang dilaksanakan di balai. Walaupun demikian, beban sewa mengalami peningkatan akibat penggunaan sewa kendaraan untuk kegiatan diklat. Sedangkan kenaikan beban honor operasional satuan kerja dikarenakan kenaikan tersebut disesuaikan dengan standar biaya masukan. Kenaikan beban barang operasional lainnya disebabkan oleh peningkatan operasional lahan praktek, instalasi laboratorium dan minyak atsiri serta instalasi perkantoran.

D.5 BEBAN PEMELIHARAAN

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp886.851.129,00 dan Rp720.353.900,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik/ Turun
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	504.942.000,00	345.472.000,00	46,16
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	381.909.129,00	317.080.500,00	20,44
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0,00	57.801.400,00	-100,00
Jumlah	886.851.129,00	720.353.900,00	23,11

Beban pemeliharaan mengalami peningkatan cukup signifikan dikarenakan penambahan gedung dan bangunan baru serta peralatan dan mesin.

D.6 BEBAN PERJALANAN DINAS

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp7.279.904.908,00 dan Rp7.664.624.189,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik/ Turun
Beban Perjalanan Biasa	2.039.262.013,00	2.662.090.619,00	-23,29
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.838.041.623,00	980.468.535,00	87,46
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.402.601.272,00	4.022.065.035,00	-15,40
Jumlah	7.279.904.908,00	7.664.624.189,00	-5,02

Beban perjalanan biasa dan beban perjalanan dinas paket meeting luar kota mengalami penurunan akibat berkurangnya jumlah diklat di balai. Sedangkan kenaikan beban perjalanan dinas paket meeting dalam kota disebabkan oleh kenaikan jumlah peserta diklat dari Provinsi NTB dan NTT yang mengikuti pelatihan di balai.

D.7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 Rp370.290.000,00. Tidak ada beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada tahun ini.

Perbandingan Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik/Turun
Beban Gedung dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0,00	220.000.000,00	-100,00
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0,00	150.290.000,00	-100,00
Jumlah	0,00	370.290.000,00	-100,00

D.8 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp2.587.055.269,00 dan Rp2.462.876.848,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik/Turun
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	588.359.294,00	558.298.846,00	5,38
Beban Penyusutan Irigasi	32.758.170,00	38.309.012,00	-14,48
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	22.491.584,00	10.188.357,00	120,75
Beban Penyusutan Jaringan	11.605.388,00	9.081.328,00	27,79
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.926.420.623,00	1.843.927.245,00	4,47
Beban Penyusutan Penyusutan Aset	5.420.210,00	3.072.060,00	76,43
Jumlah	2.587.055.269,00	2.462.876.848,00	5,04

Beban penyusutan dan amortisasi disajikan terlampir.

D.9 PENDAPATAN PELEPASAN ASET NON LANCAR

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar merupakan pendapatan atas aset yang telah dihapuskan dari daftar BMN Balai dan telah dilepaskan ke publik. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik/Turun
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	3.750.000,00	-100,00
Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0,00	3.750.000,00	-100,00

Tidak ada pendapatan dari pemindahan tangan BMN untuk tahun ini.

D.10 BEBAN PELEPASAN ASET NON LANCAR

Beban Pelepasan Aset Non Lancar merupakan beban atas aset-aset yang sudah dihentikan penggunaannya dalam kegiatan operasional balai. Beban Pelepasan Aset Non Lancar untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Beban Pelepasan Aset Non Lancar
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik/Turun
Beban Kerugian Pelepasan Aset	121.346.369,00	0,00	100,00
Jumlah Beban Pelepasan Aset Non Lancar	121.346.369,00	0,00	100,00

Beban kerugian pelepasan aset berasal dari aset-aset yang telah dihentikan penggunaannya dikarenakan kondisinya sudah rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan operasional balai dengan rincian terlampir.

D.11 PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan pendapatan yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

**Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016**

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik/Turun
Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	0,00	1.750.000,00	-100,00
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang diderita oleh negara	1.000.000,00	0,00	100,00
Penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran yang Lalu	555.000,00	925.000,00	-40,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	37.279.390,00	11.784.700,00	216,33
Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	38.834.390,00	14.459.700,00	168,57

Peningkatan pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya didominasi oleh pendapatan penyesuaian nilai persediaan, dimana nilai persediaan disesuaikan dengan harga terakhir.

D.12 BEBAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya merupakan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Perbandingan beban tersebut untuk Tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

Uraian	31 Desember 2017	31 Desember 2016	% Naik / Turun
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	299.650,00	1.803.800,00	-83,38
Jumlah Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	299.650,00	1.803.800,00	-83,38

E PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar Rp 23.476.278.031,00 dan Rp20.719.889.058,00

E.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp23.812.104.611,00 dan Rp-24.991.708.613,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.4 KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI

Saldo Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-2.478.191,00.

Tidak ada koreksi yang menambah atau mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar.

E.6 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar Rp21.997.254.145,00 dan Rp23.476.278.031,00.

F PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca

F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN BPK

Tidak ada Temuan dan Tindak Lanjut atas Temuan BPK

F3 REVISI DIPA DAN KRONOLOGINYA

Balai Besar Pertanian Ketindan selama tahun anggaran 2017 mengalami revisi DIPA sebanyak 14 (empat belas) kali, 6 kali di semester I dan 8 kali di semester II. Kronologi revisi anggaran semester I telah diuraikan pada CALK Semester I, berikut kronologi revisi anggaran untuk Semester II.

KRONOLOGIS REVISI VII ANGGARAN TAHUN 2017

Penambahan anggaran APBNP sebesar Rp. 9.743.900.000,- yang terdiri dari

1. Diklat Teknis Tematik Komoditas Hortikultura, Perkebunan, dan Tanaman Pangan dengan jumlah peserta 2.450 orang sebesar Rp. 6.860.000.000,-
2. TOT Benih dengan jumlah peserta 30 orang sebesar Rp. 408.370.000,-
3. Sertifikasi Profesi bidang Perbenihan dengan jumlah peserta 30 orang sebesar Rp. 143.550.000,-
4. Bimtek Pengawalan bagi Penyuluh dengan jumlah peserta 841 orang sebesar Rp. 1.496.980.000,-
5. Belanja modal Pengadaan Peralatan Perbenihan dan Pengadaan Gedung dan Bangunan Perbenihan sebesar Rp 750.000.000,-
6. Perjalanan pengawalan dan pendampingan dalam rangka UPSUS sebesar Rp. 85.000.000,-

KRONOLOGIS REVISI DIPA VIII ANGGARAN TAHUN 2017

Optimalisasi anggaran Diklat Fungsional RIHP dan Non RIHP, Diklat Teknis bagi Aparatur, Diklat Manajemen dan Kewirausahaan bagi Non Aparatur dan Diklat Teknis bagi Non Aparatur sebesar Rp. 468.699.000,- menjadi :

- Pengawalan dan Pendampingan UPSUS sebesar Rp. 76.590.000,-,
- Sistem Manajemen Mutu sebesar Rp. 600.000,-,
- Peningkatan Profesionalisme Petugas sebesar Rp. 25.000.000,-,
- Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara sebesar Rp. 30.000.000,-,
- Administrasi Kegiatan sebesar Rp. 75.000.000,-
- Sistem Informasi, Publikasi dan Promosi sebesar Rp. 83.689.000,-
- Penyusunan Rencana Kerja, Kinerja, Kegiatan dan Anggaran sebesar Rp. 24.204.000,-
- Pengembangan Jejaring Kerjasama sebesar Rp. 22.800.000,-
- Operasional Laboratorium sebesar Rp. 9.960.000,-
- Operasional Lahan sebesar Rp. 30.000.000,-
- Jaringan Kantor sebesar Rp. 13.500.000,-
- Uang Makan sebesar Rp. 77.356.000,-

KRONOLOGIS REVISI DIPA IX ANGGARAN TAHUN 2017

1. Optimalisasi anggaran Diklat Teknis bagi Aparatur dan Diklat Teknis bagi Non Aparatur sebesar Rp. 72.020.000,- yang digunakan untuk kegiatan Workshop Pemuliaan Tanaman dan Peningkatan Profesionalisme Widyaiswara.

2. Optimalisasi anggaran APBNP dikarenakan adanya perubahan pola kegiatan pada Diklat TOT Benih, Bimtek Pengawalan bagi Penyuluh dan Diklat Teknis Tematik sebanyak 82 angkatan sebesar Rp. 809.453.000.-

KRONOLOGIS REVISI DIPA X ANGGARAN TAHUN 2017

1. Penambahan volume output untuk Layanan Internal (Overhead) uang semula 540 layanan menjadi 631 layanan
2. Penambahan volume output untuk Layanan Pendidikan dan pelatihan yang semula 15 dokumen menjadi 17 dokumen
3. Penambahan anggaran untuk kegiatan Rapat Koordinasi Diklat dan Pengawalan dan Pendampingan UPSUS sebesar Rp. 108.180.000,-

KRONOLOGIS REVISI DIPA XI ANGGARAN TAHUN 2017

1. Perubahan jenis diklat teknis tematik hasil Rapat Koordinasi (justifikasi terlampir)
2. Anggaran perjalanan pendampingan dan pengawalan diklat tematik dikeluarkan dari output 004 Peningkatan Kompetensi SDM Pelatihan Pertanian ke output 966 Layanan Pendidikan dan Pelatihan
3. Rancangan pelaksanaan bimtek pengawalan bagi penyuluh di Propinsi NTB dan Jawa Tengah
4. Penambahan anggaran perjalanan koordinasi yang diambilkan dari APBNP
5. Penambahan akun 521219 Belanja Barang Non Operasional untuk Sistem Informasi dan Publikasi yang akan digunakan untuk jasa pembuatan profil Balai
6. Optimalisasi anggaran Diklat ATC yang digunakan untuk penambahan perjalanan profesionalisme widyaiswara dan profesionalisme petugas
7. Penambahan anggaran belanja bahan dan perjalanan dalam rangka ekspose kontribusi Balai pada komoditas perkebunan (KOPI MENGANI) yang diambilkan dari anggaran APBNP
8. Rapat tahunan Balai yang diambilkan dari anggaran APBNP

KRONOLOGIS REVISI DIPA XII ANGGARAN TAHUN 2017

1. Penambahan jumlah output pada Peningkatan Kompetensi SDM Pelatihan Pertanian sejumlah 330 orang dimana dari 4.281 orang menjadi 4.611 orang
2. Penambahan anggaran pada output Layanan Pendidikan dan Pelatihan (966) yaitu Belanja Bahan dan Belanja Barang untuk Persediaan Barang Konsumsi Sistem Informasi dan Publikasi, Belanja Bahan Pengawalan dan Pendampingan UPSUS, dan output Layanan Perkantoran (994) yaitu Operasional Instalasi Perkantoran

KRONOLOGIS REVISI DIPA XIII ANGGARAN TAHUN 2017

1. Revisi administratif dikarenakan adanya perubahan pejabat perbendaharaan dari drh. Djajadi Gunawan, MPH ke Dr. drh. Kresno Suharto, MP
2. Revisi pergeseran antar output dalam satu kegiatan satu satker yaitu pergeseran anggaran dari output 004 ke output 994 sebesar Rp. 224.400.000,-

KRONOLOGIS REVISI DIPA XIV ANGGARAN TAHUN 2017

1. Revisi dalam hal pemutakhiran data yaitu revisi anggaran pada KPA sehingga mengubah POK dan mengubah arsip data komputer RKA-K/L (adanya pergeseran anggaran dalam satu output) pada Kementerian Keuangan.

F.4 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah :

No	Nomor Rekening	Atas Nama Rekening	Bank	Saldo Rekening
1.	144-00-1174792-7	BPG 032 BBPP Ketindan (239654)	Bank Mandiri KCP Lawang	Rp.433.864.176

- Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan mengalami dua kali pergantian kepala balai, dari Dr. Ir Adang Warya, MM digantikan oleh drh. Djajadi Gunawan, MPH kemudian digantikan oleh Dr.drh. Kresno Suharto, MP dengan SK terlampir
- Terdapat Reklasifikasi atas aset dikarenakan kesalahan pencatatan tahun perolehan dengan surat keterangan terlampir.